

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang memiliki wilayah sangat luas dengan kondisi yang berbeda pada tiap-tiap daerah. Melihat kondisi tersebut maka pemerintah memberikan otonomi pada tiap pemerintah daerah agar daerah yang dipegang dapat mengatur perekonomiannya sendiri. Penetapan pemerintah daerah sebagai fasilitator pembangunan daerahnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk secara bertahap dan berkelanjutan melalui pembangunan dan peningkatan pendapatan pada daerahnya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015). Dalam mewujudkan pembangunan dan peningkatan pendapatan, pemerintah perlu berusaha agar penduduknya dapat melakukan kegiatan produktif yang mempengaruhi pendapatan dan konsumsinya. Dengan demikian untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah harus menyusun rencana atau strategi.

Strategi disusun agar dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, pemerintah dapat memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang membantu mencapai tujuan, yaitu dalam menyelesaikan masalah, menyediakan program-program yang dapat membantu masyarakat untuk keluar dari kondisi yang

sangat sulit agar dapat menciptakan kesejahteraan pada masyarakat. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, pemerintah harus mengetahui apa saja faktor penghambat ketidakberdayaan untuk mencapai kesejahteraan, sehingga strategi yang dikembangkan memenuhi kebutuhan masyarakatnya saat ini. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada hakikatnya merupakan pemberdayaan masyarakat, karena dalam pembangunan merupakan proses yang memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dalam menginisiasi, mendukung, dan bersama-sama merencanakan kegiatan yang dapat dijadikan peluang selain pengembangan sumber daya manusia, yang merupakan tujuan utama dari kegiatan ini (Teja, 2018).

Pemberdayaan dapat dilihat dari bagaimana individu, kelompok, atau masyarakat berusaha menentukan sendiri tujuan masa depan sesuai dengan harapannya. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah upaya meningkatkan harkat dan martabat sekelompok masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan atau keterbelakangan. Tujuan dari upaya ini adalah untuk membangun kapasitas dan mengembangkan potensi mereka melalui dorongan, motivasi, dan kesadaran masyarakat (Sudarmanto, 2020). Menurut Wilson dalam Anggreswari & Jayaningsih (2018) Terdapat empat tahapan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu tahap penyadaran, tahap pemahaman, tahap pemanfaatan, dan tahap pembiasaan. Tahap pembiasaan dalam proses pemberdayaan merupakan tahap akhir dimana dalam pembangunan di lingkungannya masyarakat telah terbiasa terlibat secara aktif.

Koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia memiliki tempat tersendiri dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Koperasi dan UMKM merupakan salah satu penopang kekuatan ekonomi masyarakat, mampu memperluas kesempatan kerja dan berperan dalam pemerataan kesempatan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mencapai stabilitas nasional (*Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM, 2021*). Pengembangan koperasi dan UMKM secara langsung berada dibawah pengawasan pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM pada pasal 1 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Oleh karena itu Koperasi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memiliki sebuah tujuan yaitu memajukan kesejahteraan masyarakat serta membantu membangun tatanan perekonomian nasional.

Kehadiran sektor informal berperan penting dalam kehidupan perkotaan, dapat menjadi sumber pendapatan potensial bagi penduduk kota. Selain memberikan kesempatan kerja, sektor informal dapat bertahan tanpa bantuan dan dukungan dengan menghasilkan berbagai macam barang dan jasa yang menarik. Namun seringkali sektor informal dipandang sebagai kegiatan ekonomi alternatif

dan kurang dipandang baik bagi para pencari kerja itu sendiri, pada kenyataannya. Sektor ini dapat memberi jawaban tentang kesempatan kerja selain itu dapat mengurangi pengangguran dan dapat memberikan harapan berkembangnya usaha bagi masyarakat kecil perkotaan (Andhini, 2017). Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) sebagai salah satu sektor informal merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pembangunan perkotaan. Namun sektor informal pedagang kaki lima juga dapat menimbulkan permasalahan seperti meningkatnya biaya penyediaan fasilitas-fasilitas umum perkotaan, mendorong lajunya arus migrasi dari desa ke kota, menjamurnya pemukiman kumuh. Sedangkan lingkungan perkotaan yang ditimbulkan antara lain adalah kebersihan dan keindahan kota, kelancaran lalu lintas serta penyediaan lahan untuk lokasi usaha (Firdaus, 2014)

Terkait pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini Kota Surabaya yang memiliki luas wilayah 326,81 kilometer persegi yang terbagi dalam 31 kecamatan dengan 154 kelurahan. Menurut Badan Pusat Statistik (2020) Jumlah penduduk di Kota Surabaya per tahun 2020 mencapai 2.904.751 Jiwa. Sebagian masyarakat Kota Surabaya bermata pencaharian sebagai pedagang. Pertumbuhan PKL yang semakin pesat di Kota Surabaya membuat Pemerintah Kota mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya No 17 Tahun 2003 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Surabaya mengacu kepada (Peraturan Daerah Kota Surabaya No.17 Tahun 2003) pada pasal 8 ayat (1) dimana untuk pengembangan usaha PKL, Kepala Daerah berkewajiban memberikan pemberdayaan berupa: a) bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha; b) pengembangan usaha melalui kemitraan dengan

pelaku ekonomi yang lain; c) bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan; d) peningkatan kualitas alat peraga.

Berdasarkan kalimat diatas, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah berupaya dalam melakukan pemberdayaan terhadap para PKL sesuai dengan tupoksi pada (Peraturan WaliKota No.67 Tahun 2016) dimana dalam pasal 9 dijelaskan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Mikro mempunyai fungsi pengelolaan sentra usaha makanan dan minuman milik pemerintah daerah. Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL dikota Surabaya yaitu agar PKL menjadi pemilik usaha terdaftar dengan mendapat hak perlindungan dan pembinaan sehingga dapat menjalankan usahanya pada lokasi yang ditetapkan pemerintah kota. Pembinaan dan pemberdayaan PKL diharapkan dapat mendorong para pedagang dalam mengembangkan ekonomi sektor informal dan mencapai harmonisasi keberadaan PKL (Santoso, 2012). Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro secara intensif melalui relokasi PKL ke berbagai lokasi. Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Surabaya gencar melakukan relokasi PKL ke berbagai lokasi melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Seperti wawancara yang dilakukan merdeka news:

“mereka biasanya berjualan ditempat-tempat yang terlarang, seperti trotoar, pinggir-pinggir jalan dan lain sebagainya. Ya kita kan menaungi warga Surabaya. Para PKL dengan identitas warga Surabaya, kita rangkul. Untuk warga luar Surabaya, kita kembalikan ke daerah asal masing-masing.” (Yohanes, 2019)

(<https://www.merdeka.com/peristiwa/cara-pemkot-surabaya-kelola-PKL-relokasi-ke-sentra-wisata-kuliner.html> diakses pada tanggal 26 September2021)

Dalam berita tersebut Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM) Kota Surabaya melakukan penataan kepada PKL dengan solusi relokasi hanya dilakukan untuk para pedagang yang mempunyai kartu tanda penduduk (KTP) Surabaya. Penataan PKL dengan membentuk Sentra Wisata Kuliner yang dapat disingkat menjadi SWK (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2021) diseluruh wilayah Surabaya. SWK dibangun pada lokasi yang strategis, baik disekitar pemukiman, perkantoran, tempat wisata dan lokasinya juga akan ditentukan berdasarkan hasil penelitian yang direncanakan agar pengunjung tetap ramai dan tidak mengurangi pendapatan pedagang. PKL mendapatkan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas makanan dan pelayanan. Segala upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian para pedagang. Hingga tahun 2021 diketahui jumlah SWK binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya sejumlah 48 SWK dengan total jumlah pedagang binaan Dinas Koperasi sebanyak 1.147 pedagang aktif.

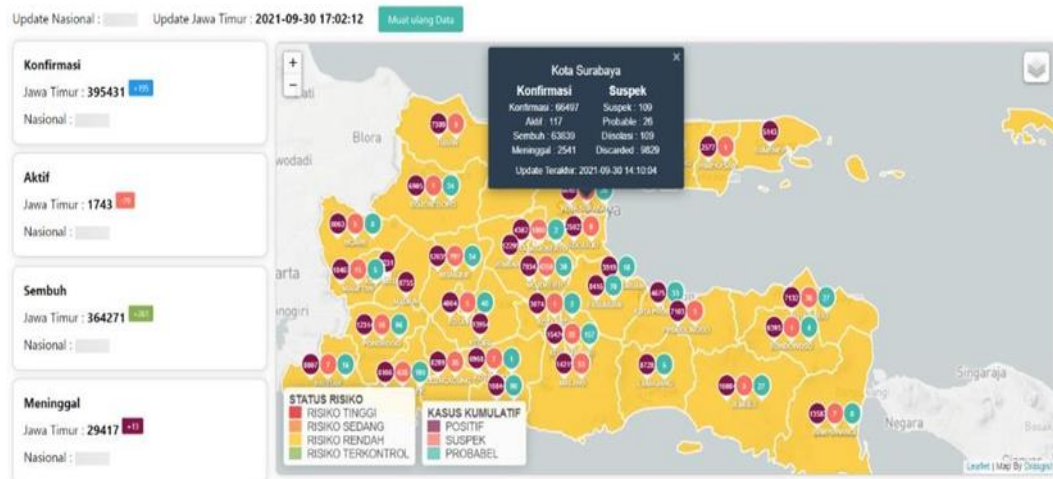
Tabel 1.1 Data SWK Binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya

No	Tempat SWK	No	Tempat SWK	No	Tempat SWK
1	Taman Bungkul	17	Lidah Kulon	33	Tandes
2	UripSumoharjo	18	Pondok Maritim	34	Klampis Ngasem
3	Penjaringan Sari	19	Jambangan	35	Balas Klumprik
4	Terminal Manukan	20	Manukan Lor	36	Tanah Merah
5	Ketabang Kali	21	Pengirian	37	Mulyorejo
6	Sukomanunggal	22	Semolowaru	38	Bratang Binangun
7	Wiyung	23	Dukuh Menanggal	39	Dharma Husada
8	Putro Agung	24	RMI Kebun Bibit	40	Convention Hall
9	Indrapura	25	Dharmawangsa	41	Kapas Krampung
10	Taman Prestasi	26	Krempangan	42	Kasuari
11	Gayungan	27	Siwalankerto	43	Bentul
12	Karah	28	Gunung Anyar	44	Embong Sawo
13	Sememi	29	Deles MERR	45	Kendung
14	Kandangan	30	Jajar Tunggal	46	Siola
15	Babat Jerawat	31	Kembang Kuning	47	Studio
16	Lidah Wetan	32	Wonorejo	48	Rungkut Kidul

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya

Namun pada awal tahun 2019, seluruh dunia termasuk Indonesia, dilanda wabah Coronavirus Disease atau yang biasa disebut Covid-19. World Health Organization (WHO) telah menyampaikan keadaan darurat akibat wabah virus Covid-19. Menyebarnya kasus Covid-19 telah mempengaruhi kehidupan banyak masyarakat, baik bidang kesehatan, pendidikan maupun ekonomi. Salah satu kota yang terdampak Covid-19 yaitu kota Surabaya dibuktikan dalam gambar dibawah ini:

Gambar 1. 1 Kasus Covis-19 Wilayah Jawa Timur



Sumber: infocovid19.jatimprov.go.id,2020

Berdasarkan gambar di atas dinyatakan bahwa Kota Surabaya merupakan daerah dengan kasus tertinggi di provinsi Jawa Timur. Jumlah kasus per tanggal 30 September 2021 sebanyak 66.497 terkonfirmasi virus Covid-19. Hal tersebut terjadi karena Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk pada tahun 2020 mencapai 2.874.314 jiwa. Terdiri dari 31 kecamatan yaitu Kecamatan Asemrowo, Benowo, Bubutan, Bulak, Dukuh Pakis, Gayungan, /Genteng, Gubeng, Gunung Anyar, Jambangan, Karang Pilang, Kenjeran, Krembangan, Lakarsantri, Mulyorejo, Pabean Cantian, Pakal, Rungkut, Sambikerep, Sawahan, Semampir,

Simokerto, Sukolilo, Sukomanunggal, Tambaksari, Tandes, Tegalsari, Tenggilis, Mejoyo, Wiyung, Wonocolo, dan Wonokromo (pemerintahan.surabaya.go.id, 2020) Dengan terus meningkatnya jumlah penderita Covid-19 mengakibatkan melambatnya roda perekonomian, pasar mulai sepi, kemudian omzet penjualan pada SWK pun juga terdampak mengalami penurunan.

Gambar 1. 2 Rekapitulasi Omzet Rata-Rata SWK Kota Surabaya Perbulan Pada Tahun 2020



Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya

Berdasarkan gambar 1.2 diatas terkait hasil rekapitulasi akhir tahun 2020, omzet yang didapat para pedagang pada awal tahun 2020 berada pada kisaran Rp. 193.352.626, mengalami penurunan pada bulan Februari, Maret, April dan Mei, selanjutnya mengalami kenaikan pada bulan Juni sampai dengan November sebesar Rp. 112.495.829, walaupun tidak secara signifikan dikarenakan ada aturan-aturan terkait Pandemi Covid-19 yakni PSBB dan PPKM Mikro dimana tempat-tempat jajanan / kuliner terdapat pembatasan baik pengunjung maupun jam operasional, sedangkan pada Desember yakni sebesar Rp. 41.935.307 terjadi penurunan kembali omzet pada SWK dikarenakan lonjakan wabah dan pengetatan aturan protokol kesehatan serta liburan natal dan tahun baru. Hal ini membuat para pedagang

memilih untuk menutup stand dikarenakan tidak ada pemasukan, seperti yang diberitakan pada media Jawapos seperti berikut:

“**JawaPos.com** – Tidak semua SWK yang dibina pemkot ramai. Di Surabaya Selatan, beberapa SWK sepi pembeli. Banyak meja yang kosong. Beberapastan pun menutup usaha. Misalnya yang terlihat di SWK Urip Sumoharjo. Hanya enam pedagang yang membuka stan. Sembilan stan lain tutup. Bahkan, salah satu stan diselimuti terpal. Siti, salah seorang pedagang, mengatakan, SWK Urip Sumoharjo memang sepi. Ramai saat sore dan malam, tapi juga tidak ramai-ramai banget, Kondisi serupa terlihat di SWK Jambangan. Di antara 20 stan, yang buka hanya 10 stan. Lainnya tutup lantaran sepi pembeli. Jika dibandingkan dengan awal SWK itu dibuka, terjadi penurunan omzet hingga 60 persen. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Salah satunya layanan pesan makanan dengan aplikasi online. Begitu pula SWK Gayungan. Dulu sehari mampu meraup pemasukan Rp600 ribu–Rp700 ribu, kini mendapat Rp300 ribu saja sudah bagus. Jumlah pedagang di SWK Masjid Agung cukup banyak. Dari total 32 stan, 27 stan terisi pedagang. Sisanya kosong”. (<https://www.jawapos.com/surabaya/21/02/2020/kalah-oleh-online-banyak-sentra-wisata-kuliner-surabaya-mati-suri/> diakses pada 30 September 2021).

Dari berita tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah pandemi, banyak SWK cenderung sepi pengunjung dari 15 stand hanya 6 stand saja yang buka bahkan sampai siang hari hanya ada 2 pengunjung saja. Hal ini mengakibatkan omzet para PKL menurun dari Rp.600.000–Rp.700.000 pada saat pandemi omzet tertinggi hanya mencapai Rp.300.000. Penurunan omzet terjadi pada beberapa SWK di Kota Surabaya seperti SWK Gayungan, SWK Urip Sumoharjo, dan SWK Masjid Agung.

Banyaknya dampak yang dirasakan para PKL pada SWK Surabaya menjadi perhatian pemerintah kota Surabaya untuk melakukan sebuah upaya dalam meningkatkan perekonomian para pedagang khususnya kota Surabaya pada masa pandemi seperti ini salah satu upaya yang dilakukan pemerintah kota Surabaya yaitu merenovasi SWK Wiyung yang awalnya adalah bekas rumah dinas lurah

yang tak terpakai sehingga pemerintah kota Surabaya berinisiatif untuk merelokasi PKL yang berjualan dipinggir jalan. SWK Wiyung berada di Surabaya Barat tepatnya pada Jalan Raya Menganti No.1 Kecamatan Wiyung. Pendirian sentra ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian para pedagang khususnya warga Surabaya. SWK wiyung memiliki keunikan tersendiri seperti yang diberitakan pada media internet rri.co.id SWK tetap jadi primadona.

“KBRN, Surabaya : Diresmikan setahun lalu (29/8), SWK Wiyung atau disingkat SWK Wiyung menjadi salah satu tempat yang direkomendasi untuk mereka yang senang mencoba jajanan khas daerah, khususnya Surabaya. Peresmian SWK Wiyung Surabaya juga berbarengan dengan peresmian Taman Mozaik oleh Walikota Surabaya. Pasca direnovasi, SWK ini terasa spesial, karena ini adalah SWK pertama yang dibangun Bu Risma saat memimpin Kota Surabaya. Sampai saat ini sudah ada 49 SWK telah dibangun di seluruh Kota Surabaya. SWK Wiyung ini bisa dijadikan jujagan bagi warga Surabaya setelah lelah berkunjung ke Taman Mozaik. Jangan khawatir bagi kalian yang berkunjung ke SWK Wiyung, karena sudah tersedia lahan parkir bagi pengunjung yang membawa kendaraan pribadi. Untuk masalah harga juga sangat ringan di kantong saku dan dompet. Menurut Admira Puspita seorang Vlogger Kuliner Surabaya , SWK sWiyung memang pas untuk jajan bersama keluarga. Sementara itu Yunus salah seorang pengunjung yang juga berprofesi Chef sebuah hotel di Surabaya menyatakan suasana di SWK Wiyung memang nyaman."Setiap hari ada musiknya, harganya lumayan standar dan rasanya juga enak enak" ujarnya. Untuk warga luar kota Surabaya yang akan berkunjung kesini juga mudah mencari lokasinya. Terletak di Jalan Menganti Wiyung. tepat bersebelahan dengan kelurahan Wiyung”.

(<https://rri.co.id/surabaya/1725-kuliner/1148940/sentra-wisata-kuliner-wiyung-surabaya-tetap-primadona> diakses pada tanggal 30 September 2021)

Seperti pemberitaan di atas, SWK wiyung merupakan SWK pertama yang dibangun oleh ibu Tri Rismaharini pada saat beliau menjabat sebagai walikota Surabaya. SWK wiyung terasa spesial karena bersebelahan dengan tempat rekreasi “Taman Mozaik” dimana diresmikan secara bersamaan dengan SWK ini. Pada SWK Wiyung sendiri diketahui memiliki fasilitas yang memadai seperti lahan

parkir yang luas, tempat yang nyaman, terdapat hiburan musik. Harga yang dipatok pun murah dengan rasa yang cukup enak sehingga SWK Wiyung dapat dijadikan rekomendasi jajanan bersama keluarga.

Gambar 1. 3 SWK Wiyung Kota Surabaya



Sumber: <https://dinkopum.surabaya.go.id/semua-gallery/>

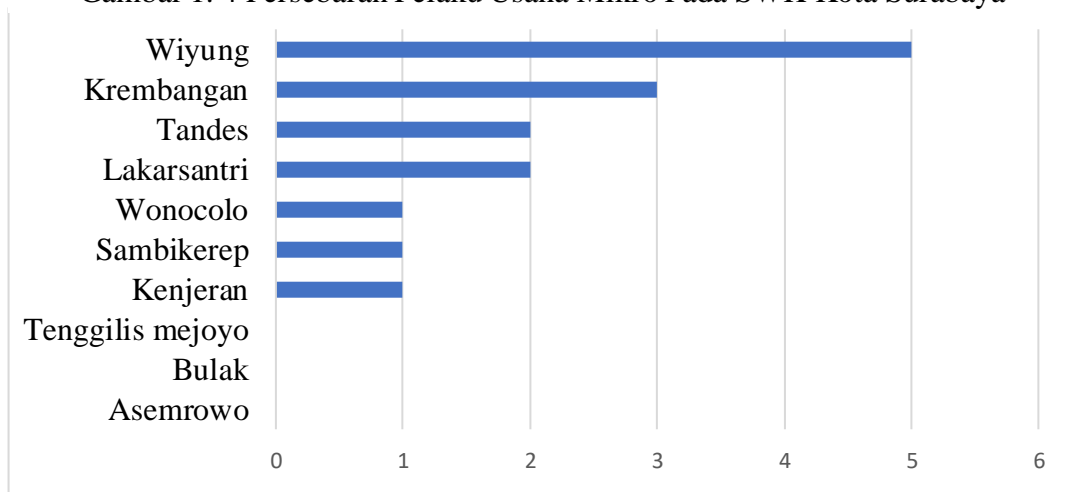
SWK Wiyung merupakan SWK pertama yang bentuknya unik dan *instagramable*, jadi SWK Wiyung akan digunakan sebagai percontohan di kota Surabaya karena bukan hanya menjadi tempat makan namun juga sebagai tempat rekreasi warga Surabaya, seperti berita yang dikutip pada media urbanasia:

“Bu Risma juga bercerita sedikit nih tentang SWK Wiyung. Kabarnya, SWK yang telah selesai direnovasi itu adalah SWK pertama dari 49 SWK yang ada di Surabaya loh. Dulu ada rumah dinas lurah, terus sayang tidak ditempati. Sementara PKL ada di luar kan kasihan. Kita masukan akhirnya, kalau SWK pertama sebenarnya ya Wiyung itu,” ungkapnya. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Eri Cahyadi mengatakan SWK Wiyung akan digunakan sebagai percontohan di Surabaya nih SWK ini bakal dikembangkan lagi sehingga bukan hanya menjadi tempat makan, tapi bisa juga jadi sarana rekreasi warga. Yang bentuknya seperti ini kan pertama kali. Jadi kan di SWK nanti tidak hanya sebagai tempat makan. Tetapi juga tempat untuk foto, itu aja sebenarnya. Insya Allah kita akan tata dan percantik lagi”.

(<https://www.urbanasia.com/taman-mozaik-dan-swk-wiyung-spot-instagramable-baru-di-surabaya-U18155> diakses pada 30 September 2021)

Berdasarkan data dari Dinas koperasi telah melakukan pembinaan kepada pelaku usaha mikro perkotaan dengan jumlah 587 orang, jika dikelompokan sesuai jenis produk yang dikelola yaitu handycraft, fashion, serta makanan dan minuman. pembinaan pada pelaku usaha makanan dan minuman sebanyak 336 orang. Intervensi yang diberikan kepada pelaku usaha mikro adalah pendampingan dan pelatihan manajemen usaha. Dari jumlah tersebut, lokasi tersebar di wilayah Surabaya.

Gambar 1. 4 Persebaran Pelaku Usaha Mikro Pada SWK Kota Surabaya



Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya

Dari gambar di atas pembinaan pelaku Usaha Mikro, juga dilakukan tersentral dengan lokasi tersebar di wilayah Kecamatan Kota Surabaya. SWK Wiyung menempati urutan teratas dalam persebaran pelaku usaha mikro. Omzet SWK Wiyung tertinggi diantara SWK lain yang berada pada Surabaya Barat yaitu SWK jajar tunggal, lidah kulon, dan lidah wetan yang masih berada pada satu wilayah Surabaya barat. Meskipun SWK Wiyung tertinggi akan tetapi juga mengalami penurunan omzet, hal tersebut dapat dibuktikan dengan wawancara oleh

Ibu Vivi Laitupa, SP selaku Kepala Bidang Usaha Mikro:

“Memang benar SWK Wiyung omzetnya tertinggi diantara 3 SWK lainnya yang ada di Surabaya barat seperti jajar tunggal, lidah wetan, dan lidah kulon. Padahal letak SWK nya pun berdekatan namun SWK wiyung yang paling ramai. Waktu bulan Mei-Juni omzet SWK Wiyung bisa mencapai 92 Juta, Namun sempat mengalami penurunan Bulan Juli Cuma dapat sekitar 16 Juta tapi semakin lama semakin meningkat tapi tidak seperti bulan Mei. Terakhir bulan September omzetnya masih mencapai 29 Juta”.

(Hasil wawancara tanggal 25 November 2021)

Melihat fenomena-fenomena diatas bahwa banyak pedagang yang mengalami penurunan omzet sebagai dampak dari pandemi covid-19. Dalam kondisi seperti ini pemerintah telah melakukan upaya pemberdayaan kepada para PKL seperti pada SWK Wiyung. Namun sebagai SWK pertama yang diresmikan oleh Bu Risma, omzet SWK Wiyung masih kalah dengan SWK Dharmahusada, Padahal SWK Wiyung sebagai pelopor SWK yang ada di Surabaya. Peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi pemberdayaan PKL pada SWK Wiyung yang dapat bertahan dimasa pandemi sehingga perlu dicontoh oleh SWK lain di kota Surabaya agar perekonomian para pedagang dapat meningkat.

Penelitian terdahulu mengenai strategi PKL pada Taman Prestasi milik Okvian & Nawangsari (2019) menunjukkan bahwa pemberdayaan dengan teori bina swadaya menurut Ismawan 1995 yaitu pengembangan sumber daya manusia berhasil meningkatkan pendapatan PKL; pengembangan kelembagaan kelompok telah berhasil menguatkan koperasi simpan pinjam; pemupukan modal swadaya telah berhasil meningkatkan permodalan PKL; pengembangan usaha produktif yang dilakukan telah berhasil meningkatkan pendapatan kaki lima; namun masih belum tersedianya informasi tepat guna yang diberikan oleh paguyuban dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya. Akan tetapi, tidak semua SWK ramai

pengunjung sehingga pendapatannya pun tak menentu salah satu penyebabnya karena letak SWK tidak strategis. Seperti pada penelitian terdahulu yang berjudul Evaluasi Kebijakan Penataan PKL di Provinsi Jawa Timur milik Pristika Bella (2017) bahwa kebijakan penataan PKL belum efektif dikarenakan tidak semua PKL ingin direlokasi ditempat yang lebih aman, bersih, dan nyaman hal ini disebabkan oleh minimnya sarana dan prasarana, kurang optimal karena kinerja tim penataan tidak intens dalam pelaksanaan kesepakatan, pemerintah tidak mendistribusikan hak secara adil. Belum responsif, karena belum ada tingkatresponsivitas yang tinggi dalam hal penataan kebijakan.

Menurut Mardikanto (2014) dalam melakukan pemberdayaan terdapat enam tujuan yaitu perbaikan kelembagaan (*better institution*), dengan peningkatan kegiatan tindakan yang diambil diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha; perbaikan usaha (*better business*), dalam hal ini perbaikan pendidikan, perbaikan kegiatan dan perbaikan kelembagaan diharapkan dapat memperbaiki bisnis yang dilaksanakan; perbaikan pendapatan (*better income*), pada hal ini diharapkan perbaikan bisnis yang dilakukan dapat memperbaiki pendapatan yang diperoleh baik pendapatan keluarga dan masyarakat; perbaikan lingkungan (*better environment*), akibat banyak terjadi kerusakan lingkungan perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan fisik dan sosial yang disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas; perbaikan kehidupan (*better living*), dengan tingkat pendapatan dan kondisi lingkungan yang membaik, diharapkan akan memperbaiki kondisi kehidupan setiap masyarakat; dan perbaikan masyarakat (*better community*),

kehidupan yang lebih baik dengan didukung oleh lingkungan fisik dan sosial yang lebih baik, diharapkan dapat terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula. Sedangkan Analisis SOAR menurut Stavros & Hinrichs (2009) merupakan sebuah alternatif terhadap analisis SWOT. SOAR adalah strategi bisnis yang berasaskan pada hal-hal positif yang telah dimiliki oleh sebuah usaha untuk dikembangkan dan dijadikan kelebihan utama.

Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi yang sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya dalam mengelola SWK melalui kajian teori Analisis SOAR (Strengths, Opportunities, Aspirations, Results). Dengan menggunakan analisis SOAR dapat mengetahui strategi pemberdayaan yang cocok sesuai dengan karakteristik yang dimiliki SWK Wiyung. Dalam kajian ini yang akan dibahas oleh peneliti adalah kekuatan, peluang, aspirasi dan hasil yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya dalam pemberdayaan PKL pada SWK Wiyung Kota Surabaya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menetapkan judul dalam penelitian ini adalah **“Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Sentra Wisata Kuliner Wiyung Kota Surabaya”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat disimpulkan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis adalah **“Bagaimana Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Sentra Wisata Kuliner Wiyung Kota Surabaya?”**

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Strategi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Sentra Wisata Kuliner Wiyung oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan manfaat mengenai strategi pemberdayaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya pada PKL SWK khususnya SWK Wiyung. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian lebih lanjut, terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan PKL.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Untuk menambah ilmu pengetahuan sekaligus menambah wawasan secara nyata sehingga dapat dijadikan bahan referensi yang berharga bagi penulis.

2. Bagi Instansi (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya)

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan serta bahan evaluasi bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya dalam pemberdayaan PKL sentra wisata kuliner kota Surabaya.

3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan bacaan bagi perpustakaan dan juga sebagai bahan tambahan literatur dan referensi bagi penelitian sejenis di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.